



## Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya

**Desy Tri Santi Rahmadani**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[santyramadhani3@gmail.com](mailto:santyramadhani3@gmail.com)

**Maulidah Narastri**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[maulidah@untag-sby.ac.id](mailto:maulidah@untag-sby.ac.id)

*Abstract.*This research aims to test the ability of Accountability and Transparency regarding the Performance of Regional Government Agencies at the Surabaya City Investment and PTSP Service. The population in this study were employees at the Surabaya City Investment and PTSP Service. The sampling technique in this research was purposive sampling with a total sample of 72 respondents. Collecting research data by distributing questionnaires to research respondents. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The research results found that both simultaneous and partial accountability and transparency had a significant positive effect on the performance of regional government agencies at the Surabaya City Investment and PTSP Department.

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Performance of Regional Government Agencies*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 72 responden. Pengumpulan data penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa baik secara simultan dan parsial Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya.

**Kata kunci:** *Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*

### LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan organisasi sektor publik menuntut pemerintah untuk melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. permasalahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengelolaan sektor publik. Pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus menjalankan kinerjanya dengan baik. Kinerja pemerintah dianggap baik ketika dapat diukur melalui pencapaian hasil yang signifikan dan optimal yang terealisasi secara nyata.

Menurut Sufiati dkk., (2022), terdapat penelitian mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi.

Permasalahan yang sering terjadi pada instansi pemerintah daerah adalah kinerja pemerintah daerah yang kurang stabil. Seperti yang dikutip pada website [bappeko.surabaya.go.id](http://bappeko.surabaya.go.id), menyatakan bahwa terdapat masalah kinerja instansi pemerintah daerah Kota Surabaya yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan *Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya*. Masalah yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan *Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dalam upaya* menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yaitu Kurangkondusifnya iklim investasi dan minat investasi yang diakibatkan pandemi covid-19 dan Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perijinan investasi (ijin prinsip) dengan realisasi.

Peneliti menilai bahwa ada urgency mengenai penulisan yang memiliki tujuan akhir yaitu: Untuk menguji pengaruh positif signifikan Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Surabaya; Untuk menguji pengaruh positif signifikan Transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Surabaya.

Peneliti memiliki harapan terhadap hasil penelitian yaitu: bagi teoritis, Akuntabilitas dan transparansi dapat membentuk dasar untuk *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, instansi pemerintah daerah dapat mencapai efisiensi yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan; bagi Instansi Pemerintah Daerah; Sebagai penilaian dan masukan mengenai signifikansi akuntabilitas dalam mengevaluasi kinerja instansi, serta sebagai alat untuk mengambil keputusan, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas kerjanya; bagi penulis, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber wawasan untuk memajukan pemikiran ilmiah dengan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada instansi pemerintah daerah; dan bagi kebijakan, diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan *Good Governance* dari segi akuntabilitas dan transparansi untuk mengukur, menilai dan meningkatkan kinerja instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah suatu cabang dari akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengukuran, identifikasi, dan pelaporan seluruh aktivitas keuangan dan transaksi yang terkait dengan entitas sektor publik atau pemerintah. Menurut Hartoto, et al., (2023), akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, penyusutan, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas bertujuan menyediakan informasi keuangan agar dapat diambil keputusan.

### **Akuntabilitas**

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau kelompok yang telah diberi tugas oleh pihak yang memberi mandat, baik dalam konteks vertikal maupun horizontal, untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut. Mardiasmo (2016:20) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang bertindak sebagai pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan tindakan yang merupakan tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan mandat (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

### **Transparansi**

Menurut teori pemerintahan, transparansi adalah prinsip yang menjamin hak akses dan kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi tentang cara pemerintahan dijalankan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang telah dicapai. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018: 25), transparansi didefinisikan Prinsip yang menjamin kebebasan setiap individu untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, termasuk informasi seputar kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Menurut Driyantama Putra (2020) mengidentifikasi beberapa indikator transparansi, yaitu: informasi; kemudahan; sistem; dan kemampuan.

## **Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran dari sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah dapat dicapai. Menurut Mahsun (2016:25), Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai pencapaian suatu kegiatan, program, atau kebijakan berhasil dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang telah dijelaskan dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Menurut Nurkholis (2019:103) mendefinisikan Indikator Kinerja adalah Sebuah ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian suatu target atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah Daerah meliputi: nilai investasi daerah; nilai AKIP; dan kepuasan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kinerja instansi pemerintah daerah (Y). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berwujud dalam bentuk angka-angka yang dapat diolah dan diproses menggunakan sistem statistik menggunakan aplikasi SPSS (Statistic Product and Service Solution). Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data survei kuisioner yang menggunakan *skala likert lima gradasi*. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya yang berjumlah sebanyak 75 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan kriteria inklusi dalam penelitian yaitu Minimal 3-5 tahun bekerja di divisi tersebut; Memahami tema penelitian; dan Memahami deskripsi pekerjaan.. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengujian yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, serta koefisien determinasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan terkait investasi dan perizinan terpadu Kota Surabaya. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkantor di Jalan Tunjungan No.

1-3 Surabaya. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 084 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya yaitu unsur pelaksana mengenai urusan pemerintahan pada bidang pelayanan investasidan perizinan usaha yang dipimpin oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### Uji Instrumen Penelitian – Validitas dan Reabilitas

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 22 pada variabel Akuntabilitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,814	0,227	Valid
X1.2	0,833	0,227	Valid
X1.3	0,806	0,227	Valid
X1.4	0,681	0,227	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Dapat disimpulkan dari Tabel 1 bahwa instrumen untuk variabel Akuntabilitas, yang terdiri dari 4 pertanyaan, seluruhnya dinyatakan valid karena nilai r hitung  $>$  r tabel, yaitu sebesar 0,227. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa data yang terdapat dalam variabel Akuntabilitas dapat digunakan untuk data penelitian.

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 22 pada variabel Transparansi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,748	0,227	Valid
X1.2	0,713	0,227	Valid
X1.3	0,733	0,227	Valid
X1.4	0,750	0,227	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Dapat disimpulkan dari Tabel 2 bahwa instrumen untuk variabel Transparansi, yang terdiri dari 4 pertanyaan, seluruhnya dinyatakan valid karena nilai r hitung  $>$  r tabel, yaitu sebesar 0,227. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa data yang terdapat dalam variabel Akuntabilitas dapat digunakan untuk data penelitian.

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 22 pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,817	0,227	Valid
Y.2	0,729	0,227	Valid
Y.3	0,729	0,227	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Dapat disimpulkan dari Tabel 3 bahwa instrumen untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 4 pertanyaan, seluruhnya dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, yaitu sebesar 0,227. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa data yang terdapat dalam variabel Akuntabilitas dapat digunakan untuk data penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	4	0,868	Reliabel
Transparansi	4	0,817	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	3	0,752	Reliabel

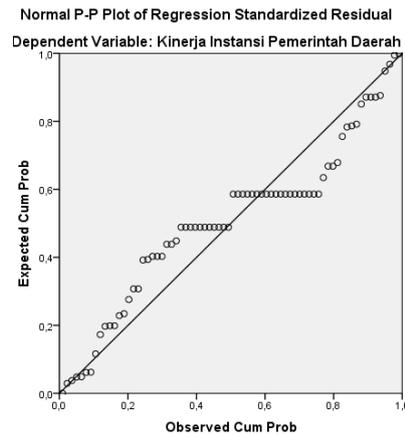
Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Dari hasil uji reliabilitas pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah seluruhnya memperoleh nilai pada *Cronbach Alpha*  $\geq$  0,6. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut dianggap reliabel dalam konteks penelitian ini sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Gambaran hasil uji normalitas dapat disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Uji Normalitas

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa distribusi data mengikuti arah garis diagonal dan tersebar secara homogen di sekitar garis diagonal tersebut. Kesesuaian ini dengan asumsi normalitas data dalam penelitian menegaskan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal dan dapat digunakan dalam penggunaan model regresi.

### Uji Multikolonieritas

Berikut ini disajikan hasil uji multikolonieritas dengan memperhatikan nilai tolerance dan VIF, sebagaimana terlihat di bawah ini:

Tabel 5 Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Akuntabilitas	,342	2,927
Transparansi	,342	2,927

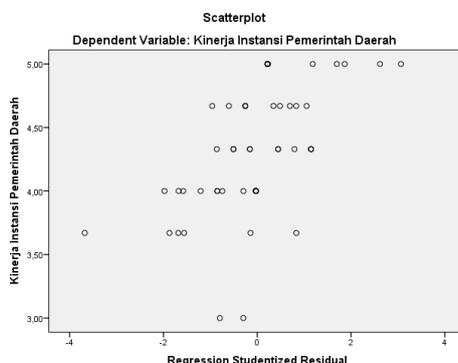
a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada Tabel 5 terlihat bahwa nilai tolerance dan VIF yaitu pada variabel Akuntabilitas nilai *tolerance* > 0,10 senilai 0,342 dengan nilai VIF 2,927 < 10 maka dapat disimpulkan variabel Akuntabilitas tidak terjadi multikolonieritas. Selanjutnya variabel Transparansi diketahui nilai tolerance > 0,10 sebesar 0,342 dan nilai VIF 2,927 < 10 yang artinya tidak terjadi multikolonieritas dalam variabel Transparansi.

## Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berdasarkan pada Gambar 2, menunjukkan bahwa pola penyebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0, disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas menyatakan tidak ada kecenderungan heteroskedastisitas dalam model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi menggunakan uji Durbin Watson (DW) yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Uji Autokorelasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>	
Sampel	Durbin-Watson
72 Responden	1,886

- a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas  
 b. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Dari tabel 6, terlihat bahwa nilai Durbin Watson (d) adalah 1,886. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah sampel (n) sebanyak 75 responden dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2, dari tabel diperoleh nilai dU sebesar 1,6802 dan nilai dl sebesar 1,5709. Karena nilai  $dU < d < 4 - dU$ , atau  $1,6802 < 1,886 < 2,3198$ , dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

## Pengujian Hipotesis

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linear berganda mengenai variabel independen seperti akuntabilitas dan transparansi, serta variabel dependen kinerja instansi pemerintah daerah, dihasilkan dari pengujian disajikan dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	,520	,309	
Akuntabilitas	,355	,109	,363
Transparansi	,522	,114	,510

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui persamaan regresi linier berganda adalah:

$$y = 0,520 + 0,355 X_1 - 0,522 X_2 + e$$

Berikut adalah penjelasan dari hasil analisis regresi linier berganda: a) Dalam persamaan regreslinier berganda yang telah diperoleh, diketahui bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,520. Artinya jika variabel Akuntabilitas dan Transparansi, sama dengan nol, maka Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai sebesar 0,520; b) Koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,355, Koefisien regresi akuntabilitas menunjukkan arah positif. Artinya, jika Akuntabilitas mengalami kenaikan, maka Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) juga akan cenderung mengalami peningkatan; c) Koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,522, Koefisien regresi transparansi menunjukkan arah negatif. Artinya, jika Transparansi mengalami penurunan, maka Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) juga akan cenderung mengalami penurunan.

### Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Tabel 8 Uji T

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,695	,094

Akuntabilitas	3,256	,002
Transparansi	4,573	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berikut merupakan hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 8 dapat diuraikan dibawah ini: a) Dari hasil pengujian hipotesis pada variabel Akuntabilitas, ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,002 (0,000 atau  $\leq 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, yaitu bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, dapat diterima; b) Dari hasil pengujian hipotesis pada variabel Transparansi, ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000 atau  $\leq 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, yaitu bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, dapat diterima.

## Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi 0,000 atau  $\leq 0,05$ , dapat diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 9 Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,953	2	6,976	81,487	,000 <sup>b</sup>
	Residual	6,164	72	,086		
	Total	20,117	74			

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 9, ditemukan bahwa nilai  $F_{Hitung}$  mencapai 81,487 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau  $\leq 0,05$ . Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen memenuhi kriteria uji kelayakan, sesuai dengan hasil tersebut.

### Uji Determinan ( $R^2$ )

Uji Determinan ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X), yaitu Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap variabel dependen (Y), yaitu Kinerja Instansi Pemerintah. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2018:97).

Tabel 10 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	. Error of the Estimate
1	,833 <sup>a</sup>	,694	,685	,292

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam Tabel 10, diperoleh nilai R Square sebesar 0,694 atau 69,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Akuntabilitas dan Transparansi memiliki kontribusi sebesar 69,7% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sementara itu, sebesar 30,6% sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dari uji hipotesis, diketahui bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Secara

khusus, pengaruh dari Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah bergerak ke arah positif. Disimpulkan bahwa hipotesis pertama menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dapat diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya telah melakukan riset mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh (Sufiati et al., 2022; Driyantama Putra et al., 2022; Dia, D et al., 2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Makassar. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin baik Akuntabilitas maka akan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dari uji hipotesis, diketahui bahwa Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Secara khusus, pengaruh dari Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah bergerak ke arah positif. Disimpulkan bahwa hipotesis kedua menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dapat diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya telah melakukan riset mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh (Sufiati et al., 2022; Driyantama Putra et al., 2022; Dia, D et al., 2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Transparansi yang diterapkan oleh instansi pemerintah daerah dapat menjadi pendorong bagi Kinerja Instansi Pemerintah daerah, baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah maupun dalam pengambilan keputusan publik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya dikarenakan kesesuaian pegawai dalam bekerja, yang dinyatakan dengan transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan terhadap masyarakat, serta kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban terkait penggunaan sumber daya dan implementasi kebijakan.

Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya dikarenakan kesesuaian pegawai dalam bekerja, yang dinyatakan pada penyediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat terkait kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Surabaya, disarankan agar pihak instansi tetap mempertahankan dan mengembangkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa dampak yang diberikan kepada masyarakat mencapai tingkat maksimal; Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menyertakan variabel lain yang diduga memengaruhi faktor-faktor kinerja instansi pemerintah daerah, namun belum dipelajari dalam penelitian ini, seperti pengendalian intern, pengawasan internal maupun fungsi pemeriksaan intern.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dia, D., Sari, W., Aini, H., Destalya, G., Nova, A., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Baturaja, U. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU. In *Jurnal ETAP* (Vol. 3, Issue 1).
- Driyantama Putra, D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. In *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* (Vol. 7, Issue 1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Haris, A., Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 34. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.301>
- Hartati, A., Fanggida, H. C., Binawat, E., Aisyah, S., Fanggida, F. O., Ala, H. M., . . . Lerrick, Y. F. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hartoto, Tatmimah, I., Endraria, E., Muzayyanah, M., Sriyani, S., Djasuli, M., . . . Ardhiarisa, O. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Widina Media Utama.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: Media.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 232.
- Marin sambo, E., Wiyana, A., Pattikaloba, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, S. (2022). YUME : Journal of Management Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 5(3), 293–305. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.446>
- Maulani, P. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Repository Ekuitas*.
- Muliansyah, E., Nugroho, M., & Riyadi, S. (2022). The effect of accountability, transparency and operational efficiency on decisions to pay zakat with ability as intervening variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 9(1), 138-150. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v9n1.2017>
- Narastri, M., Setyowati, E. D., Wulandari, P., & Yantino, A. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 17-28.
- Novatiani, A., Wedi, R., Kusumah, R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. In *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* (Vol. 10). [www.eporja.bandungbaratkab.go.id](http://www.eporja.bandungbaratkab.go.id)
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahmatilah, S. R. (2020). Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi. *Elibrary UNIKOM*, 17-18.
- Ridwan, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Repository Universitas Islam Riau*.
- Salihi, I. R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 2; No. 6.

- Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Efendi, Priyojadmiko, E., Butarbutar, M., Purba, S., . . . Muliana.(2020). *Manajemen Kinerja dalam Organisasi*. Medan: Kita Menulis.
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., & Erhan, A. N. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 61.
- Sufiati, Sambo, E. M., Wiyana, A., & Pattikaloba, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 293 - 305.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syاهدika, A. V., Taufik, A. B., & Octavianty, E. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 11-12.
- Zahra, A., Arif Lubis, F., & Harmain, H. (2023). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 236–247.